

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

“The historical task of the complete reunification of the motherland must be fulfilled, and will definitely be fulfilled
-Xi Jinping (BBC 2019)”

Isu Taiwan dalam sejarahnya merupakan salah satu permasalahan politik eksternal di luar batasan kedaulatan Tiongkok yang dianggap sensitif bagi masyarakat dan elit pemerintahan Tiongkok. Taiwan sejak tahun 1949 telah memiliki pemerintahan sendiri dengan sistem politik yang berbeda dan status entitas yang masih belum dideterminasikan. Bagi Tiongkok, isu Taiwan merupakan salah satu permasalahan utama dalam agenda kepentingan nasional Tiongkok yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dan menjadi prioritas terpenting dalam arah pengambilan kebijakan luar negeri pemerintah Tiongkok bagi setiap rezimnya. Usaha dari rezim-rezim pemerintah Tiongkok dalam menjaga keteraturan hubungan Tiongkok-Taiwan dan mencegah kemerdekaan Taiwan secara jelas mulai diatur melalui pengenalan kebijakan *Cross-Strait Relations* pada tahun 2004. Hubungan keduanya saling diatur dalam perjanjian *Cross-Strait Relations Act* yang menegaskan komitmen kedua negara khususnya Tiongkok dalam menjaga hubungan yang damai dan stabil dengan Taiwan sehingga dapat terbentuk hubungan lintas-selat yang konsisten, progresif, dan berkelanjutan terutama untuk dialog masa depan Taiwan (Mainland Affairs Council 2017).

Komitmen keduanya yang diatur dalam *Cross-Strait Relations Act* tersebut mulai tercermin pada pola kebijakan di era Hu Jintao tahun 2002-2012 yang mana Hu menegaskan istilah “*Peace, Development, and Stability*” dari pembentukan kebijakan luar negerinya salah satunya terhadap Taiwan. Dinamika kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan di era Hu secara dominan menunjukkan kebijakan yang stabil meskipun terdapat aspek kebijakan yang tegas dari Hu. Stabilitas tersebut dapat ditunjukkan dari promosi enam poin inisiasi kebijakan Hu bagi hubungan Tiongkok-Taiwan yaitu (1) kepatuhan terhadap prinsip “One China”, (2) promosi kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dengan Taiwan, (3) mengakui

budaya asli Taiwan dan meningkatkan hubungan persamaan budaya, (4) mempromosikan pertukaran personel kedua entitas, (5) mengizinkan Taiwan berpartisipasi secara independen pada organisasi-organisasi internasional, (6) meningkatkan fokus dalam mengurangi dan mengakhiri permusuhan kedua belah pihak (Guo dan Guo 2010). Melalui usaha inisiasi Hu tersebut, mendorong status *Cross-Strait Relations* Tiongkok-Taiwan berkembang positif menuju stabilitas regional dan menjadi isyarat sekaligus bahwa Hu tidak secara tergesa dalam memprioritaskan agenda reunifikasi Taiwan, namun lebih secara bertahap dengan menekankan pada keterhubungan ekonomi yang lebih intensif dengan Taiwan dalam mendekatkan Taiwan kepada Tiongkok.

Seiring dengan bergantinya transisi rezim menuju kepemimpinan Xi pada tahun 2013, terjadi perubahan dari pola kebijakan *Cross-Strait Relations* dengan Tiongkok yang semakin menunjukkan perilaku yang asertif atau tegas terhadap Taiwan di era Xi. Huang (2017) berargumen tidak dapat dipungkiri bahwa Xi akan memberikan tekanan semakin besar dalam mencapai progres politik dalam isu Taiwan di masa pemerintahannya. Sejak kenaikan Xi sebagai pemimpin Tiongkok di tahun 2013, Xi telah mempromosikan gagasan baru bagi agenda nasional Tiongkok terkait agenda “the Chinese Dream” sebagai agenda ambisi dari Xi untuk mengembalikan Tiongkok menuju masa kejayaan di zaman kedinastian dan mengenalkan retorik kebijakan luar negeri baru yang didasarkan atas pendekatan *high-profile* yaitu “Striving for Achievement” yang mengisyaratkan berjuang semaksimal mungkin dalam mencapai *core interest* nasional Tiongkok. Menurut Liao (2021) isu reunifikasi Taiwan telah menjadi prioritas utama dari agenda besar Xi tersebut sebagai *core interest* nasional Tiongkok yang perlu dicapai. Karena itu, hal tersebut berujung pada tindakan Tiongkok yang semakin asertif dalam agenda reunifikasi Taiwan di bawah pemerintahan Xi.

Bentuk tindakan asertif Tiongkok terhadap Taiwan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aktivitas seperti perilaku diplomatik Tiongkok melalui pidato dan pernyataan asertif Xi dalam agenda reunifikasi Taiwan, hingga menuju bentuk koersi nyata dalam bidang ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Taiwan. Sebagai contoh, salah satu pernyataan asertif Xi tersebut mulai dapat diidentifikasi

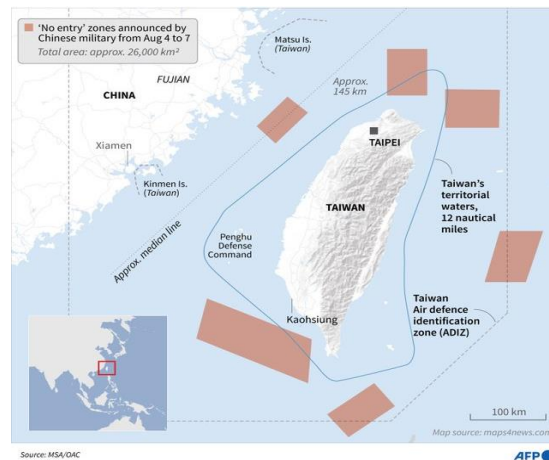
di Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, Xi menegaskan terhadap representasi Taiwan bahwa

“The issue of political disagreements that exist between the two sides must reach a final resolution and these issues cannot be passed on from generation to generation” - Xi Jinping (Reuters 2013).

Bentuk asertif Tiongkok terhadap Taiwan tersebut kemudian semakin terlihat meningkat sejak dipilihnya Tsai Ing-wen sebagai Presiden Taiwan di tahun 2016 (He 2020). Sejak kemenangan Tsai, Tiongkok telah membentuk beberapa kebijakan yang semakin asertif salah satunya dengan memutus hubungan komunikasi formal lintas-batas Tiongkok-Taiwan (McGuire 2017).

Bentuk aktivitas asertif Tiongkok lainnya juga dapat diidentifikasi dari penggunaan instrumen militer dalam mengancam dan menekan Taiwan untuk segera menuju agenda reunifikasi Tiongkok. Hal ini dapat diidentifikasi dari informasi surat kabar yang disebarkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan bahwa terdapat peningkatan aktivitas pelanggaran yang dilakukan Tiongkok secara berulang kali dengan berbagai tipe pesawat udaranya terhadap *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Taiwan. Salah satunya dapat diidentifikasi di awal tahun 2022 dari Januari-Agustus dengan lebih dari 700 berbagai jenis pesawat udara militer Tiongkok telah melanggar wilayah kedaulatan udara Taiwan (Ministry of National Defense Republic of China 2022). Bentuk provokasi militer tersebut selanjutnya semakin diperparah melalui digelarnya latihan perang militer udara dan laut Tiongkok dengan mengelilingi sekitar wilayah kedaulatan laut dan udara Taiwan pada 4-7 Agustus yang seolah-olah kegiatan tersebut merupakan bentuk simulasi invasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan (lihat gambar 1.1).

Gambar 1.1 Area Latihan Perang Militer Tiongkok di Sekitar Wilayah Kedaulatan Laut dan Udara Taiwan



Sumber: AFP News (2022)

Bentuk-bentuk dari aktivitas asertif Tiongkok terhadap Taiwan di era Xi tersebut juga semakin dibuktikan dari respon balik pernyataan dari Presiden Tsai bahwa “Beijing is replacing its commitment to a peaceful resolution with an increasingly aggressive posture” (Ing-wen 2021). Dengan adanya wujud tindakan asertif dan provokasi dari Tiongkok tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa pola kebijakan Tiongkok yang dibentuk oleh Xi terhadap Taiwan memiliki indikasi yang sangat bersikeras untuk segera mengintegrasikan Taiwan dalam jangka waktu yang tidak lama.

Melalui penjelasan latar belakang permasalahan penelitian di atas, penelitian ini akan menjelaskan pola terjadinya perubahan kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan yang semakin asertif di masa kepemimpinan Xi. Permasalahan ini menjadi cukup penting untuk dikaji dalam isu hubungan internasional karena isu konflik Tiongkok-Taiwan merupakan isu konflik historis yang belum terselesaikan hingga saat ini dan perubahan kebijakan Tiongkok dengan semakin asertif terhadap Taiwan akan memiliki dampak yang signifikan dan mendalam kedepannya bagi dinamika hubungan internasional salah satunya mampu memicu ketegangan dan memiliki kemungkinan menuju konflik terbuka secara regional hingga global.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan semakin asertif pada masa pemerintahan Xi Jinping?

1.3. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari tinjauan pustaka yang telah diteliti, penulis menemukan tiga kategori argumen penelitian yang menjelaskan penyebab-penyebab dari semakin asertifnya kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan. Adapun ketiga kategori dari faktor determinan tersebut adalah kategori sumber kondisi fundamental struktur internasional dan domestik, faktor orientasi internasional pemimpin dominan, serta proses dalam pengambilan kebijakan luar negeri Tiongkok.

Kategori pertama adalah penelitian-penelitian yang menganalisis semakin asertifnya Tiongkok tersebut disebabkan oleh sumber kondisi fundamental struktur internasional dan domestik. Argumen dari Mearsheimer (2010), He dan Feng (2014), dan Sorensen (2021) dapat diklasifikasikan dalam kategori pertama dengan melihat tesis dari ketiga penelitian tersebut cukup koheren. Mearsheimer (2010) memandang bahwa pergeseran dari distribusi kekuatan menjadi sumber eksternal dari semakin asertifnya Tiongkok. Semakin kuatnya status Tiongkok secara global di tengah menurunnya kekuatan Amerika Serikat (AS) mampu menciptakan perilaku asertif Tiongkok terhadap Taiwan. Sedangkan He dan Feng (2014) juga memandang bahwa faktor dari semakin tingginya tekanan dan ancaman eksternal menjadi sumber dari semakin asertifnya Tiongkok dari era Hu menuju Xi khususnya terhadap ancaman intensi kekuatan AS yang mengindikasikan dukungannya terhadap kemerdekaan Taiwan. Sebaliknya, Sorensen (2021) memiliki argumen lain dari Mearsheimer (2010) dan He dan Feng (2014) bahwa bukan sumber struktur internasional, melainkan sumber struktur domestik yang menjadi penyebab perubahan tersebut. Meningkatnya kapabilitas kekuatan ekonomi domestik dan militer menjadi faktor dari meningkatnya konfidensi Tiongkok dalam bersikap asertif salah satunya terhadap Taiwan.

Kategori kedua adalah penelitian-penelitian yang menganalisis semakin asertifnya Tiongkok disebabkan secara dominan oleh perubahan preferensi orientasi internasional dari pemimpin Tiongkok. Argumen dasar dari Zhang (2015) dan Liao (2016) dapat diklasifikasikan dalam kategori kedua. Keduanya berargumen bahwa semakin asertifnya Tiongkok disebabkan oleh perubahan

preferensi orientasi internasional dari Hu menuju Xi. Kedua penelitian tersebut memiliki pandangan yang sama bahwa perilaku asertif Tiongkok salah satunya terhadap Taiwan tersebut dipengaruhi secara kuat oleh faktor preferensi orientasi internasional Xi sebagai pemimpin dominan yang ingin memunculkan kembali sentimen orientasi pendekatan hubungan internasional tradisional di masa kejayaan Tiongkok yang didasarkan atas pendekatan *high-profile* dalam kebijakan luar negerinya.

Kategori ketiga adalah penelitian-penelitian yang menganalisis semakin asertifnya Tiongkok karena perubahan dari proses pengambilan kebijakan luar negeri Tiongkok. Argumen dari Shichen (2017) dan Blackwill dan Campbell (2016) dapat diklasifikasikan pada kategori ketiga bahwa reformasi perubahan dari proses pengambilan kebijakan menjadi faktor kuat dari perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok. Shichen (2017), berargumen bahwa terdapat indikasi perubahan proses pengambilan kebijakan luar negeri di dalam institusi di era Xi yang lebih menekankan sentralisasi kekuatan dalam sistem pengambilan kebijakan dengan tujuan meningkatkan keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan. Sejalan dengan Shichen (2017), Blackwill dan Campbell (2016) juga menyatakan bahwa sentralisasi dari pengambilan kebijakan luar negeri di era Xi tersebut nantinya berdampak pada karakterisasi kebijakan dari Tiongkok yang asertif, koersif, dan provokatif terhadap isu teritorial salah satunya terhadap Taiwan.

Berdasarkan dari klasifikasi ketiga kategori di atas, penulis menemukan bahwa terdapat faktor determinan dari perilaku asertif Tiongkok di era Xi yang masih belum diteliti secara mendalam yaitu berdasarkan faktor determinan idiosinkratik dari Xi. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini menggunakan faktor idiosinkratik sebagai faktor determinan lainnya dalam memahami semakin asertifnya Tiongkok terhadap Taiwan di masa kepemimpinan Xi. Faktor idiosinkratik tersebut mampu menjadi dasar dalam memahami persepsi gaya kepemimpinan individu dari Xi dalam memandang Taiwan. Pada sisi lainnya, penelitian ini juga tidak semata-mata menghiraukan kategori determinan lainnya khususnya dari kategori pertama dan kedua karena berdasarkan dari argumen preskripsi Gustavsson (1999) bahwa faktor sumber kondisi fundamental struktur

internasional dan domestik tidak dapat terlepas dalam mempengaruhi persepsi idiosinkratik pemimpin dominan dari Xi.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Pembentukan kebijakan luar negeri memiliki proses yang kompleks yang meliputi berbagai faktor yang mampu mempengaruhi arah pembentukan kebijakan tersebut. Dugis (2008) mengidentifikasikan kebijakan luar negeri sebagai hal yang dinamis yang memiliki tendensi untuk berubah dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan alat eksplanasi yang dapat menjelaskan pola perubahan perilaku negara. Beberapa ahli kebijakan luar negeri seperti Hermann (1990), Goldmann (1988), dan Gustavsson (1999) telah menyediakan model dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri. Hermann (1990), menjelaskan perubahan model kebijakan luar negeri dengan menekankan pentingnya faktor individu dan institusi domestik. Akan tetapi, model yang diberikan Hermann (1990) hanya mampu menjelaskan dalam kerangka satu pemerintahan yang sama atau *incumbent government* sehingga Hermann (1990) mengecualikan analisis dari adanya transisi pemerintah baru. Sedangkan Goldmann (1988) menyediakan model perubahan kebijakan luar negeri yang berfokus pada *structural constraint model* yang hanya menekankan pada pentingnya faktor-faktor fundamental dari sumber perubahan baik secara internasional atau domestik sebagai faktor dari perubahan kebijakan luar negeri.

Berdasarkan kedua model dari Hermann (1990) dan Goldmann (1988), terdapat beberapa respon kritik dari ahli lainnya bahwa keduanya kurang memberikan analisis yang sistematis dari terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Sedangkan Gustavsson (1999) menyediakan kerangka teoritik alternatif sebagai pembaruan dari konsep proposisi-proposisi dari sebelumnya dalam memahami perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Model perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan analisis Gustavsson (1999) menyediakan proposisi analisis melalui *checklist model* sebagai tiga model elemen tahapan dalam menganalisis terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Ketiga elemen tahapan tersebut tersebut adalah elemen perubahan kondisi struktur fundamental suatu

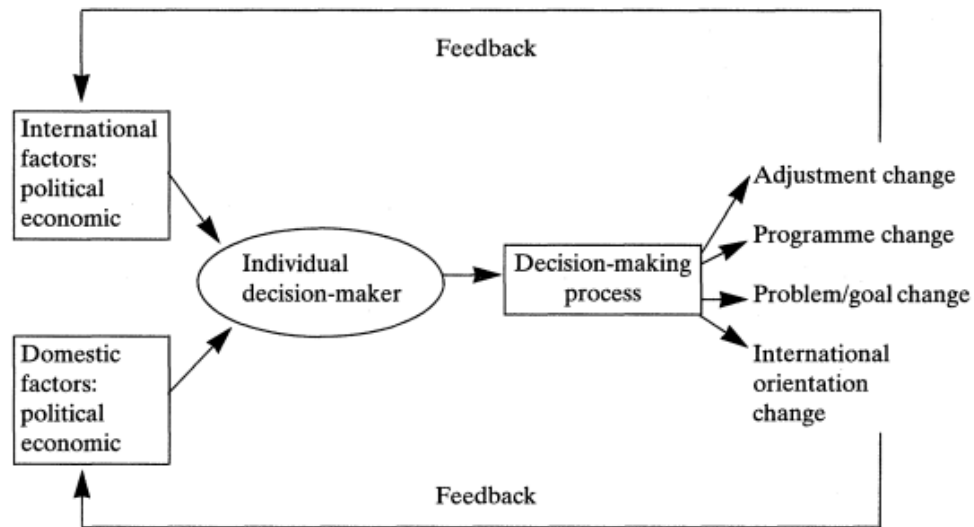
negara, elemen kepemimpinan individu, dan elemen dalam proses pembentukan suatu kebijakan.

Elemen sumber fundamental struktur terbagi menjadi sumber struktur internasional dan domestik. Sumber fundamental struktur internasional meliputi faktor perubahan eksternal dari politik internasional dan ekonomi internasional. Faktor politik internasional merepresentasikan adanya perubahan distribusi kekuatan dan aspek tradisional militer dari keamanan nasional negara. Adapun faktor ekonomi internasional merepresentasikan perubahan yang terjadi dalam transaksi lintas batas ekonomi (Gustavsson 1999). Sedangkan sumber kondisi struktur domestik, meliputi faktor perubahan tekanan politik domestik dan ekonomi domestik. Faktor politik domestik meliputi adanya pola perubahan dari birokrasi politik, partai politik, dan aktor sosial atau elit yang berpengaruh dalam perubahan kebijakan luar negeri. Adapun faktor ekonomi domestik meliputi adanya dinamika perubahan dari perkembangan ekonomi suatu negara yang dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan pengangguran (Gustavsson 1999).

Pada sisi lainnya, Gustavsson (1999) juga menekankan pentingnya elemen pengaruh dari aktor pembentuk kebijakan individu seperti pemimpin dominan negara sebagai elemen kedua dari determinan perubahan kebijakan luar negeri. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya negara tidak dapat membentuk kebijakan, hanya faktor persepsi dari karakteristik idiosinkratik pembuat kebijakan sebagai *intermediate step* yang mampu membuat suatu faktor kondisi struktur eksternal tersebut dipersepsikan menjadi determinan dari perubahan kebijakan luar negeri. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa elemen sumber fundamental struktur internasional dan domestik tidak memiliki dampak independen terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Hal ini yang menjadi alternatif proposisi pembeda Jakob Gustavsson dari model lainnya yang secara dominan kurang menganalisis pentingnya peran persepsi pembentuk kebijakan sehingga hal ini menjadi justifikasi penulis dalam memilih model dari Jakob Gustavsson. Menurut Gustavsson (1999) sumber fundamental perubahan struktural tersebut harus dimediasikan oleh pembuat kebijakan dominan dahulu dalam suatu institusi proses

pembentukan kebijakan sehingga faktor spesifik yang mana dipandang oleh pembentuk kebijakan dapat menjadi pemicu dari perubahan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan empat tipologi perubahan (lihat gambar 1.2).

Gambar 1.2 Model Skema Proses Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jakob Gustavsson



Sumber: Gustavsson (1999)

Berdasarkan skema gambar 1.2, penulis memandang bahwa faktor persepsi idiosinkratik dari Xi dalam memandang elemen struktur internasional dan domestik menjadi determinan kuat dari berubahnya kebijakan Tiongkok yang asertif terhadap Taiwan. Persepsi dari pemimpin dominan tersebut kemudian diproyeksikan melalui proses pembentukan kebijakan salah satunya melalui metode politik *Pulling* dan *Hauling* sebagai strategi yang dilakukan pemimpin dominan untuk melakukan persuasi dan manipulasi agar elit politik lainnya dalam institusi pemerintahan menyetujui perubahan kepercayaan dalam orientasi politik tersebut. Karenanya, ketika terjadi pergantian individu pembentuk kebijakan yang diikuti dengan kepercayaan yang berbeda, maka struktur institusi didalamnya akan cenderung ikut sehingga mampu terbuka posibilitas *window of opportunity* dari perubahan kebijakan luar negeri suatu negara (Gustavsson 1999).

1.4.2. Konsep Idiosinkratik dari Level Analisis Individu

Pembentukan proyeksi kebijakan luar negeri baru tentunya tidak terlepas dari pengaruh peran pemimpin sebagai faktor analisis individu. Menurut Rourke (2007), idiosinkratik menjadi pendekatan khusus yang menganalisis peran dari karakteristik personal individu sebagai faktor kuat dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Intensi dan latar belakang yang dimiliki setiap pemimpin dominan menjadi aspek yang krusial terhadap terjadinya perubahan dari suatu kebijakan luar negeri. Karenanya, Rourke (2007) mengelaborasi empat faktor penting yang berkaitan satu sama lain sebagai bentuk dari idiosinkratik pemimpin yang meliputi personalitas, ego dan ambisi, sejarah politik dan pengalaman personal, dan persepsi dan realitas operasional yang dimiliki oleh pemimpin dominan.

Pertama, personalitas merupakan orientasi pola-pola perilaku yang dimiliki pemimpin dominan yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri (Dyson 2006). Menurut Barber (1985 disitasi dalam Rourke 2007), personalitas politik yang dimiliki oleh pemimpin meliputi dua kategori skala aktif dan pasif. Skala aktif dari pemimpin mengisyaratkan kecenderungan perilaku pemimpin yang proaktif dan ambisius sebagai penggagas dalam pembentukan kebijakan. Sedangkan skala pasif mencerminkan perilaku pemimpin yang hanya ingin berperan sebagai pengikut dalam pembuatan kebijakan. Kedua, ego dan ambisi personal dari pemimpin menjadi faktor yang juga mampu mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri baru. Hal ini dapat diidentifikasi dari seberapa besar kekuatan politik yang ingin dikontrol oleh pemimpin individu dalam pemerintahannya.

Ketiga, sejarah politik dan pengalaman personal yang dimiliki oleh pemimpin juga mampu menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Pengalaman personal dan sejarah yang dimiliki pemimpin dominan baik positif atau negatif mampu menjadi determinasi pemimpin tersebut dalam menginisiasi suatu agenda baru. Keempat, persepsi dan realitas operasional yang menjadi salah satu faktor determinasi idiosinkratik terpenting dalam pembentukan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan pembentuk kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri dalam memandang struktur baik

secara internasional atau domestik. Persepsi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut akan membentuk realitas operasional yang merupakan istilah yang mempengaruhi kecenderungan persepsi pemimpin dalam mempersepsikan atau melabelkan struktur tersebut sebagai ancaman, kesempatan, tekanan, insentif, atau lainnya (Rourke 2007).

Merujuk pada hal tersebut, penulis mensintesis bahwa perubahan struktur internasional dan domestik sebagai faktor non-independen dari Gustavsson (1999) dapat dipersepsikan pemimpin berdasarkan karakteristik idiosinkratik mereka dengan menuju dua arah persepsi realitas operasional yaitu dipandang sebagai kesempatan yang dapat dieksploitasi atau sebagai ancaman. Dalam hal ini, pemimpin akan memandang suatu kondisi struktur internasional sebagai kesempatan yang dapat dieksploitasi melalui cara-cara tertentu seperti kerja sama atau bahkan melalui metode asertif berdasarkan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan idiosinkratik dari pemimpin (Rongkas dan Sulaiman 2019). Pemimpin kemudian juga dapat mempersepsikan struktur internasional sebagai ancaman apabila kondisi struktur internasional khususnya negara-negara yang memiliki kapabilitas kekuatan lebih kuat mengancam kepentingan nasional sehingga menekan pemimpin tersebut menuju opsi-opsi perubahan kebijakan dengan tujuan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

1.5. Hipotesis Penelitian

Kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Xi Jinping menjadi semakin asertif karena, pertama, dipengaruhi secara kuat oleh figur Xi yang ambisius terhadap ide-ide perjuangan untuk mengembalikan Tiongkok menuju masa kejayaan. Kedua, dipengaruhi oleh relasi personalitas nasionalisme Xi yang sejalan dengan faktor semakin meningkatnya gelora nasionalisme domestik masyarakat dan elit Tiongkok, dan diikuti juga oleh faktor relasi eksternal dari meningkatnya sentimen terkait kemerdekaan Taiwan yang dipersepsikan Xi sebagai ancaman.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual dan Operasional

1.6.1.1. Figur Ambisius dari Pemimpin Individu Tiongkok

Menurut Dynes et al. (2018), personalitas ambisius merupakan keinginan besar yang memotivasi suatu individu dalam mengejar posisi kekuasaan. Sedangkan menurut Ivanchenko et al. (2019), figur ambisius merupakan personalitas yang dimiliki individu yang penuh dengan perjuangan untuk menuju suatu pencapaian baik pencapaian politik atau lainnya. Merujuk pada kedua definisi tersebut, penulis berargumen bahwa figur ambisius merupakan keinginan besar dari suatu individu dalam mencapai suatu pencapaian politik. Dalam hal ini, figur ambisius yang dimiliki Xi Jinping dapat dilihat dari keinginan Xi untuk memperbesar kekuasaannya melalui pembentukan agenda-agenda pencapaian politik baru salah satunya dengan menghapus periode pemimpin Tiongkok di tahun 2018 dan membentuk agenda reunifikasi Taiwan dalam ideologi Xi sebagai ideologi baru dari *core interest* PKC.

1.6.1.2. Gelora Nasionalisme dalam Masyarakat dan Pemimpin Tiongkok

Nasionalisme pada dasarnya merupakan konsep yang multiinterpretatif yang memiliki beragam definisi berdasarkan fenomena tertentu. Bagi Muttaqin et al. (2006), nasionalisme dapat didefinisikan sebagai perjuangan politik dalam mencapai kebebasan seperti di masa dekolonialisasi atau perjuangan dalam mencapai kepentingan kelompok atau bangsa tertentu seperti di masa sekarang. Huddy dan Khatib (2007), kemudian memperjelas definisi nasionalisme sebagai arti perjuangan dalam mencapai kepentingan bangsa tertentu dapat berupa arti perjuangan dalam mempromosikan dan menegaskan keunikan sejarah suatu bangsa dan menegaskan hak wilayah yang harus dimiliki negara-bangsa tersebut. Merujuk pada kedua definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa nasionalisme merupakan ideologi perjuangan suatu bangsa dalam mencapai kepentingan bersama salah satunya kepentingan dalam menjaga integritas wilayah kesatuan negara-bangsa. Dalam konteks nasionalisme Tiongkok, salah satu perjuangan politik yang perlu dicapai dalam meraih kepentingan bersama adalah agenda reunifikasi terhadap Taiwan dan hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa pidato asertif terhadap Taiwan yang ditunjukkan Xi dalam meningkatkan gelora nasionalisme masyarakat Tiongkok.

1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif. Grey (2014) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan atau sebab dari terjadinya suatu fenomena dengan menyediakan bukti-bukti data dalam membantu dalam menemukan relasi kausalitas yang ada. Merujuk pada pernyataan tersebut, merepresentasikan bahwa terdapat relasi kausalitas sebab-akibat dalam menganalisis suatu fenomena dari penelitian ini.

1.6.3. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan batasan ruang lingkup kebijakan asertif Tiongkok terhadap Taiwan secara spesifik dengan jangkauan tahun penelitian dari 2013 hingga 2022. Tahun 2013 dipilih sebagai landasan awal kebijakan asertif Tiongkok terhadap Taiwan dengan terpilihnya Xi sebagai presiden. Dari waktu ke waktu, kebijakan tersebut menjadi semakin asertif hingga mencapai puncaknya pada Agustus-Oktober 2022 ketika Tiongkok menggelar latihan perang di Selat Taiwan dan sekitarnya serta terpilihnya Xi untuk ketiga kalinya sebagai Sekretaris Jenderal PKC.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Zed (2004), teknik studi pustaka merupakan riset pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber kepustakaan yang tersedia dalam mendapatkan data penelitian. Hal ini berarti jangkauan studi pustaka tidak memerlukan riset lapangan karena hanya terbatas pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja yang berbasis pada jenis sumber data sekunder. Kabir (2016) mendefinisikan data sekunder sebagai metode pengambilan data tidak langsung yang didapat melalui hasil kajian pustaka yang telah diolah seperti melalui buku, jurnal, berita, artikel, catatan resmi pemerintah seperti publikasi resmi buku putih dari pemerintah, dan bentuk pustaka lainnya yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknis analisis data melalui teknik *content analysis* sebagai metode penelitian kualitatif dalam mengolah kelanjutan data yang telah didapat dari teknik pengumpulan data. Menurut White dan Marsh (2006), teknik

content analysis merupakan teknis analisis penelitian yang bertujuan mengidentifikasi isi dari data-data konten berbasis informasi teks atau tertulis secara mendalam.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua menjelaskan pengaruh personalitas ambisius Xi terhadap semakin asertifnya kebijakan Tiongkok kepada Taiwan. Bab ketiga menjelaskan pengaruh relasi gelora nasionalisme di Tiongkok dan sentimen ancaman terkait kemerdekaan Taiwan yang mempengaruhi pemikiran Xi untuk membentuk kebijakan yang asertif terhadap Taiwan dari tahun ke tahun. Bab keempat menjelaskan kesimpulan dari penelitian.